

Hardiwan Prayogo

MENOLAK KUTUKAN SUMBER DAYA

Pada awal pandemi, sekitar April-Mei 2020, diskusi seputar arsip banyak bicara soal kemungkinan kerja pengarsipan dalam situasi keberjarakan. Kemungkinan yang bisa ditempuh adalah arsip digital. Tentu pembicaraan seputar arsip digital ini sudah sering terdengar, terlebih dalam situasi teknologi 4.0. Majalah Arsip ANRI Januari-Juni 2019 pernah menjadikan teknologi 4.0 dalam dunia arsip sebagai tema edisi. Tulisan ini bukan ingin mengulang pembahasan serupa, tetapi lebih coba mengelaborasi salah satu tantangan kerja pengarsipan dalam dinamika dunia digital saat ini, yaitu data. Baik data dalam problem tuntutan keterbukaan, perlindungan atas kerahasiaan, hingga ancaman

surveillance capitalism. Persoalan ini akan coba diketengahkan dengan studi kasus arsip digital seni visual yang ada di online archive milik lembaga arsip komunitas, Indonesian Visual Art Archive (IVAA).

ONLINE ARCHIVE IVAA

Selama 25 tahun berdiri, dengan fokus pada arsip dan seni visual, kerja IVAA tidak terputus hanya pada perkara seni. Tentu ini, didasari atas keyakinan bahwa kesenian selalu terikat pada isu konteks sosial yang mengitarinya, IVAA paling sering memulai kerja pengarsipan dari dokumentasi peristiwa seni, baik itu pameran, diskusi, *performance art* dan lain sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud mulai dari materi

audio visual meliputi foto dan video pelaksanaan acara, termasuk materi berbasis teks seperti katalog, poster, hingga liputan media.

Secara singkat, sebaran ragam materi arsip digital IVAA yaitu foto (jpg, tiff, png), video (mp4, MTS, mpeg), audio (mp3, wav), dan teks (pdf, doc, rtf). Seluruhnya disimpan pada hardisk eksternal terlebih dahulu, untuk kemudian dicatat sebagai arsip yang diterima. Penerimaan (atau akuisisi) sumber arsip IVAA bisa berasal dari dokumentasi IVAA, sumbangan/donasi seniman/ keluarga seniman/ peneliti atau siapapun, dan digitalisasi file dari format analog. IVAA juga sampai saat ini masih merawat arsip analog (positif/ negatif film, vhs, mini-dv, cassette, klipng dari tahun 1950-

PRESERVASI

an), yang dikumpulkan dari tahun 1995-2006. IVAA baru benar-benar beralih ke format digital pada tahun 2007, sekaligus mulai membuat portal arsip online. Arsip digital ini kemudian diolah sesuai dengan karakteristik materinya masing-masing, sampai akhirnya dipublikasikan melalui kanal arsip online IVAA, yaitu <http://archive.iva-online.org/>.

Pada *website* ini terlihat bagaimana IVAA membagi arsipnya dalam 4 kategori utama, yaitu Pelaku Seni, Karya Seni, Peristiwa Seni (*Event*), dan Koleksi Dokumen.

Bicara keamanan data, arsip yang dipublikasikan melalui kanal ini disimpan pada server milik IVAA sendiri. Singkatnya, dapat dinyatakan

cukup aman dari gangguan, dalam hal ini adalah hacker. Keamanan atas data memang menjadi salah satu prioritas utama ketika mulai membangun sistem pengarsipan digital tahun 2007. Perlu dicatat pula bahwa seluruh arsip yang berada di *website* berarti sudah melalui proses persetujuan dari pemilik untuk



Tangkapan layar *website* Indonesian Visual Art Archive (IVAA)

dipublikasikan. Dengan kata lain bisa diakses siapapun dan dimanapun secara bebas. Hanya saja untuk mendapat file dengan resolusi tinggi, atau beberapa arsip dengan ketentuan khusus, bisa menghubungi arsiparis iva.

Jika ditanya darimana acuan IVAA membuat kesepakatan tersebut? Itu berdasarkan kesepakatan bersama antara IVAA sebagai lembaga arsip dengan pemilik arsip, entah seniman, keluarga seniman, peneliti, maupun

kolektor. Mengapa IVAA tidak mengacu pada aturan resmi yang dibuat pemerintah? Jawabannya lebih mudah, karena belum ada aturan resmi yang ditujukan untuk melindungi peredaran data digital user di dunia maya.

SUMBER DAYA DATA

Trimester pertama 2021 ini diawali dengan pembahasan yang cukup rumit soal Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data

Pribadi (RUU PDP). Sebenarnya dapat dinyatakan agak terlambat ketika pemerintah baru sekarang cukup serius membicarakan perihal tersebut. Sementara sejak tahun 2016, negara-negara uni eropa sudah memiliki *The General Data Protection Regulation* (GDPR), yaitu perlindungan dan privasi data di Uni Eropa dan Wilayah Ekonomi Eropa. Praktiknya mungkin kita rasakan sekarang. Pengguna Whatsapp di Indonesia jika ingin

tetap menggunakan aplikasi tersebut, diharuskan membagikan semua datanya ke perusahaan Induk mereka, yaitu Facebook. Kebijakan ini tidak diberlakukan di Eropa, karena mereka memiliki GDPR.

Sebenarnya apa pentingnya data kita terlindung dan tidak semudah itu dibagikan lewat dunia maya? Saya akan mengutip dari salah satu artikel di www.economist.com yang berkata bahwa *the world's most valuable resource is no longer oil, but data*. Tentu ini benar belaka, saya tidak akan ikut menyebut berapa nilai ekonomi yang diperoleh dari 'bisnis' ini. Tetapi silakan cek deretan 10 orang terkaya di dunia tahun 2021, dan lihat apa bisnisnya. Maka jika selama ini kita kerap mendengar sumber daya alam, sumber daya manusia, kini juga ada yang bernama sumber daya data.

KUTUKAN SUMBER DAYA

Situasi pandemi ini sekaligus membuat kita sadar, bahwa negara belum memiliki master basis data yang terpadu. Meski barangkali hampir seluruh warga Indonesia memiliki KTP elektronik, implementasi basis data yang berelasi antar bidang masih jauh panggang dari api. Kita harus sadari ini sebagai kelemahan. Dalam kelemahan ini, sebenarnya kita dihadapkan pada satu ancaman nyata, yaitu *resource curse*, atau kutukan sumber daya.

Dahulu, istilah ini ditujukan bagi negara atau wilayah yang memiliki limpahan sumber daya alam, namun selalu berkecamuk dalam perang saudara, kolonialisme, atau imperialisme karena memperebutkannya. Kemudian

bagaimana dengan zaman sumber daya data? Siapakah yang akan sial tertimpa kutukan sumber daya?

Jawabannya bisa siapa saja, karena pada dasarnya semua manusia akan menjadi *user* ketika terindeks dalam kerja algoritma. Kerja algoritma yang mendefinisikan *user*, bukan *user* yang mendefinisikan dirinya sendiri. Algoritma bekerja melalui data yang secara tidak sadar kita setor pada pelaku *surveillance capitalism*. Istilah *surveillance capitalism* atau kapitalisme pengawasan tumbuh seiring perkembangan industri dan teknologi 4.0. Shoshana Zuboff dalam *The Age of Surveillance Capitalism*, pengawasan yang dimaksud berasal dari pelaku industri swasta, yang lebih canggih dari perangkat mata-mata negara. Pengawasan bertujuan utama untuk alasan ekonomi dan bisnis, meski kemudian terselip agenda politik. Pengawasan yang berasal tidak dari perangkat yang eksklusif, tetapi lahir dari piranti rumahan bahkan personal. Dengan demikian, singkatnya bisa dikatakan bahwa setiap manusia, khususnya pengguna internet bisa terkena kutukan sumber daya, bahkan secara tidak sadar. Karena toh pada dasarnya semua manusia memiliki data. Kini yang membedakan hanya seberapa dirinya bisa mengontrol. Kontrol yang lahir tidak hanya dari dalam diri, tetapi seharusnya juga ada aturan dari pemerintah yang tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi.

MENCARI KEMUNGKINAN

Jika lembaga arsip atau pengarsipan fisik melakukan langkah

preservasi arsip agar terlindung dari kerentanan akibat cuaca atau bencana alam, lalu bagaimana mempreservasi data pribadi kita yang berbentuk arsip digital dalam database dunia yang semakin tanpa batas? Tulisan singkat ini tentu tidak mampu mencarikan solusi atas pertanyaan rumit itu, tetapi saya ingin kembali pada studi kasus arsip IVAA.

Sebagai lembaga arsip komunitas, maka IVAA mengumpulkan dan menyimpan data dari para pelaku seni. Sebagai manusia, pelaku seni barangkali adalah insan yang unik, karena pengalaman dan ekspresi dirinya kerap diwujudkan secara artistik. Jika karya seni, hasil penelitian, catatan perjalanan milik pelaku seni kita maknai sebagai data, posisi lembaga arsip komunitas seperti IVAA menjadi sangat penting karena menyimpan data dalam bentuk yang berbeda. Berbeda dari data yang diolah oleh algoritma pelaku *surveillance capitalism*. Tentu, kedaulatan atas data masihlah jalan panjang. Praktik dalam wilayah arsip komunitas ternyata mengindikasikan suatu kemungkinan atas kedaulatan data. Bermula dari sini, dapat kita rumuskan lebih jauh, bagaimana sebenarnya dalam skala yang lebih besar, negara mampu mewujudkannya. Mewujudkan manusia yang terbebas dari kutukan sumber daya.